

EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN TERHADAP PAD KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA TIMUR

Barep Setiaji¹, Badrus Zaman², Linawati³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusantara PGRI Kediri, Jawa Timur

Email koresponden : barepst@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History

Submission : 02 - 08 - 2024

Review : 08 - 08 - 2024

Revised : 11 - 08 - 2024

Accepted : 12 - 08 - 2024

Publish : 12 - 08 - 2024

Keywords :

Efektivitas,
Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan,
Kontribusi,
Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

This research is motivated by the problem of Realization of Separated Regional Management Wealth Results (RSRMWR) in East Java which has experienced fluctuations over the last three year period. Because the decline could result from less than optimal management of the business entity, it is estimated that the Regional Owned Enterprises (ROE) sector will become a business entity that always suffers losses and burdens the Regional Revenue and Expenditure Budget (RREB). It is expected to contribute to Regional Original Income (ROI), but in the field more grants flow from the RREB to ROE, while a small share of profits from ROE is set aside for ROI. The research aims to determine and analyze the effectiveness and contribution of RSRMWR to ROI. The research approach uses quantitative causality. The type of data used in this research is secondary data sourced from djpk.kemenkeu.go.id, the analysis method used is multiple linear regression analysis. The results of this research show that partially and simultaneously the effectiveness of RSRMWR and the contribution of RSRMWR do not have a significant effect on the ROI of Regencies and Cities in East Java in 2021-2023.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan realisasi Hasil Kekayaan Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan (HPKDYD) di Jawa Timur yang mengalami fluktuasi selama periode tiga tahun terakhir. Sebab turun bisa dari pengelolaan badan usahanya kurang maksimal, diperkirakan sektor BUMD menjadi badan usaha yang selalu rugi serta membebani APBD. Diharapkan memberikan kontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) namun di lapangan lebih banyak hibah mengalir dari APBD untuk BUMD, sedangkan sedikit bagian laba dari BUMD yang disisihkan untuk PAD. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas dan kontribusi HPKDYD terhadap PAD. Pendekatan penelitian menggunakan kuantitatif kausalitas. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder bersumber djpk.kemenkeu.go.id, metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan efektivitas HPKDYD dan kontribusi HPKDYD tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten dan Kota di Jawa Timur tahun 2021-2023.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak Daerah yaitu suatu penghasil utama penghasilan daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang difungsikan dengan tujuan untuk menunjang

biaya pada saat menjalankan fungsi dan wewenang pemerintah daerah serta pembangunan. Pengambilan pajak daerah bersifat memaksa yang memiliki dasar dari undang-undangan sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penghasilan daerah yang setara dengan norma perundang-undangan. (Saputra, 2022)

PAD menjadi komponen inti pendapatan daerah yang resmi, yakni berasal dari pajak daerah, hasil usaha daerah, retribusi daerah, dan penghasilan badan daerah. Jadi kontribusi untuk pembayaran pajak pada seorang wajib pajak, dapat membuat ekonomi di daerah mampu meningkat sehingga membuat masyarakat jadi lebih makmur. (Susanti et al., 2023).

Pemerintah daerah berusaha dalam mengembangkan PAD melalui peningkatan pada unsur-unsur pada PAD. PAD didapatkan melalui Retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (HPKDYD), Pajak Daerah, dan PAD lain-lain yang resmi. HPKDYD merupakan hasil usaha keuntungan dari organisasi komersial tempat pemerintah daerah berinvestasi, badan usaha tersebut mungkin badan usaha milik daerah (BUMD), perusahaan swasta maupun kelompok masyarakat, dan badan usaha milik negara (BUMN). (UU Nomor 1, 2022)

HPKDYD adalah suatu hal yang didapatkan melalui pengelolaan kekayaan yang berbeda dan tersendiri dengan pengelolaan APBD. Definisi lain HPKDYD yaitu penghasilan daerah yang bersumber dari pengelolaan kekayaan daerah yang sudah terpisah. Hal ini diterapkan juga oleh pemerintah daerah kota atau kabupaten di Jawa Timur. Bagian keuntungan atau laba yang diberikan untuk Pemerintah Daerah (Dividen) dalam Penyertaan Modal pada BUMD yang kebanyakan di Jawa Timur dalam bidang air minum ada pada PDAM lalu adapun di bidang lembaga keuangan pada Bank Jatim dan BPR Bank Daerah. (Afiyah & Masyitah, 2023)

Realisasi HPKDYD di Jawa Timur memiliki permasalahan yaitu terjadi penurunan dari yang target selama periode tiga tahun terakhir. Sebab HPKDYD turun bisa dari pengelolaan badan usahanya kurang maksimal, saat ini diperkirakan sektor BUMD menjadi badan usaha yang secara konstan mengalami kerugian menjadi tanggungan bagi APBD. Diharapkan dapat turut memberi andil dalam memperbesar PAD namun kenyataannya kejadian yang terletak pada lapangan lebih banyak mencerminkan banyaknya hibah yang didapatkan melalui APBD untuk BUMD, sedangkan sedikit bagian laba dari BUMD yang disisihkan untuk PAD. Permasalahan seperti ini menyebabkan penurunan PAD Kabupaten dan Kota di Jawa Timur.

Tahun	Anggaran	Realisasi	Efektivitas
2018	11.680.000.000	11.470.000.000	98,16%
2019	12.220.000.000	15.300.000.000	125,21%
2020	16.840.000.000	13.310.000.000	79,01%

Sumber : djpk.kemenkeu.go.id

Gambar 1 Rata-rata Efektivitas HPKDYD Kabupaten dan Kota di Jawa Timur
Periode Tahun 2018 – 2020

Gambar tabel di atas menggambarkan bahwa efektivitas HPKDYP Kabupaten dan Kota di Jawa Timur periode 2019 mendapati kenaikan presentase efektivitas paling besar dan mengalami penurunan di tahun 2020. memunculkan fenomena fluktuasi data dalam efektivitas HPKDYP.

Tahun	Realisasi HPKDYP	Realisasi PAD	Kontribusi
2018	11.470.000.000	488.300.000.000	2,35%
2019	15.300.000.000	526.780.000.000	2,91%
2020	13.310.000.000	502.420.000.000	2,65%

Sumber : djpk.kemenkeu.go.id

Gambar 2 Rata-rata Kontribusi HPKDYP Kabupaten dan Kota di Jawa Timur
Periode Tahun 2018 - 2020

Gambar tabel di atas menggambarkan bahwa kontribusi HPKDYP terhadap PAD Kabupaten dan Kota di Jawa Timur periode 2019 menggambarkan peningkatan presentase kontribusi paling besar dan mengalami penurunan di tahun 2020. Dimana dalam kontribusi HPKDYP ini sangat kurang kepada PAD di kabupaten dan kota di Jawa Timur.

Penelitian terkait HPKDYP kepada PAD telah dilaksanakan dalam penelitian terdahulu, namun masih mendapatkan hasil yang berbeda. Peneliti Rizalni (2023) mendapatkan hasil HPKDYP yang tidak memiliki pengaruh yang relevan kepada PAD pada Kabupaten/Kota Sumatera Barat. Penelitian Natsir et al (2023) mendapatkan hasil penelitian memperlihatkan jika HPKDYP memiliki pengaruh yang relevan kepada PAD Kabupaten Maros.

Penelitian terkait Efektivitas dan Kontribusi HPKDYP terhadap PAD telah dilaksanakan pada penelitian terdahulu, namun masih mendapatkan hasil yang berlawanan. Penelitian Zuhri et al (2021) mendapatkan hasil rata-rata efektivitas HPKDYP Kabupaten Belitung Timur sedari periode 2015-2019 mempunyai rata-rata sejumlah 100,08% yang dapat dikategorikan sebagai sangat efektif, kontribusi HPKDYP sejak periode 2015-2019 yaitu sebesar 3,34% serta dapat masuk pada kriteria sangat kurang. Peneliti Funangi et al (2018) mendapatkan hasil rata-rata rasio efektifitas HPKDYP yang dapat dikategorikan sebagai efektif yaitu sebesar 95,36%, sedangkan rata-rata kontribusi HPKDYP terhadap PAD yaitu sejumlah 5,56% masuk kategori sangat kurang. Peneliti Mayssara (2018) mendapatkan hasil rata-rata tingkat pencapaian efektivitas HPKDYP Kabupaten Gunungkidul termasuk dalam sangat efektif 101%, sedangkan rata-rata tingkat pencapaian kontribusi HPKDYP Kabupaten Gunungkidul termasuk dalam kriteria sangat kurang 7%.

Landasan Teori

Definisi Pendaptan Asli Daerah (PAD) menurut Firdausy (2017), yaitu PAD merupakan seluruh pendapatan yang diperoleh dari usaha bisnis daerah. PAD adalah pendapatan yang diterima suatu daerah dari sumber-sumber di dalam wilayahnya dan dipungut berdasarkan kebijakan daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Definisi HPKDYD menurut Zuhri et al. (2021), mengacu pada prinsip pengelolaan keuangan daerah, hasil dari pengelolaan aset terpisah adalah pendapatan daerah, termasuk pembagian keuntungan dari menginvestasikan dana ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), keuntungan dan dividen hasil kerjasama dengan pihak luar. Proporsi keuntungan perusahaan daerah digunakan untuk menghitung persentase PAD yang diperoleh dari hasil pengelolaan kekayaan daerah tertentu, persentase keuntungan bank dan lembaga keuangan non bank, serta persentase keuntungan investasi pada lembaga keuangan lainnya. Suatu entitas ekonomi berbentuk saham yang membagikan dividen.

Menurut Mardiasmo (2018), efektivitas merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan organisasi. Pada saat suatu ketika organisasi mencapai tujuannya, maka ia berfungsi dengan baik. Efektivitas hasil program dan derajat pencapaian tujuan program ditunjukkan dengan indikator efektivitas. Efektivitas proses kerja dalam unit organisasi akan meningkat seiring dengan sejauh mana kontribusi hasil terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.

Definisi Kontribusi menurut Mardiasmo (2018). Kontribusi adalah bantuan, dukungan, atau sumbangan. Semakin besar rasio kontribusi HPKDYD yang diukur, maka HPKDYD juga berkontribusi atau mendukung pertumbuhan PAD.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan melangsungkan pendekatan penelitian, yang peneliti gunakan berjenis kuantitatif. Maka penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk menguji hipotesis menggunakan data sekunder sebagai bahan penelitian yang berupa data angka untuk di analisis yang berasal dari Efektivitas dan Kontribusi HPKDYD terhadap PAD dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistic 23.

Teknik ini akan memakai teknik temuan kausalitas, kausalitas menggambarkan sebab dan akibat yang bertujuan dalam menyadari hubungan antara sebab dan akibat variabel. Maka dengan menggunakan teknik penelitian kausalitas dapat menguji hipotesis serta memberi penjelasan fenomena hubungan sebab akibat antara efektivitas HPKDYD dan kontribusi HPKDYD terhadap PAD.

Tempat yang menjadi sumber dalam melakukan pengambilan data terletak pada website djpk.kemenkeu.go.id pada bagian portal data APBD terletak di Google.com. Alasan pengambilan data di djpk.kemenkeu.go.id, karena peneliti bisa mendapat data untuk penelitian ini yakni data anggaran dan realisasi HPKDYD dan realisasi PAD pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. Waktu penelitian akan berlangsung dari bulan Maret – Juni 2024 selama empat bulan.

Populasi penelitian ini adalah laporan anggaran. dan realisasi HPKDYD dan realisasi PAD seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur yang berjumlah 9 Kota dan 29 Kabupaten sejak berlakunya UU Nomor 1 (2022) sampai dengan saat ini. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan anggaran dan realisasi HPKDYD dan realisasi PAD seluruh

kabupaten dan kota di Jawa Timur. Sampel penelitian ini adalah data anggaran realisasi HPKDYD, ralisasi perolehan PAD Kabupaten dan Kota di Jawa Timur tahun 2021 sampai 2023.

Dengan menggunakan teknik dokumentasi ini, peneliti bisa mendapatkan informasi berupa arsip data laporan anggaran realisasi HPKDYD dan realisasi PAD Kabupaten dan Kota di Jawa Timur dalam laman web djpk.kemenkeu.go.id. Teknik Analisis Data merupakan suatu tahap proses peneliti seperti kegiatan pengumpulan data serta pengolahan data yang berguna mentafsirkan data sesudah diperoleh melewati ilmu statistik. Dengan menggunakan penelitian regresi linear berganda adapun aplikasi yang digunakan yakni IBM SPSS Statistic 23 punya tujuan mengartikan fungsi-fungsi setiap variabel, Dari variabel independen dan dependen sehingga bisa dilakukan pengujian. Dalam penelitian ini regresi linear berganda ada Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Selanjutnya Uji Hipotesis meliputi uji t, Uji F, dan Koefisien Determinasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data Variabel

Variabel Terikat

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y).

Pendapatan Asli Daerah (Y)

Berikut adalah data rata-rata PAD kabupaten dan kota di Jawa Timur periode tahun 2021 - 2023:

Tabel 1 Rata-rata PAD Kabupaten dan Kota di Jawa Timur Periode Tahun 2021 – 2023

No	Kab/Kota	Tahun	Realisasi PAD
1	Kabupaten Bangkalan	2023	357.760.000.000
		2022	281.900.000.000
		2021	271.660.000.000
2	Kabupaten Banyuwangi	2023	567.760.000.000
		2022	516.760.000.000
		2021	520.020.000.000
3	Kabupaten Blitar	2023	411.640.000.000
		2022	422.740.000.000
		2021	407.530.000.000
4	Kabupaten Bojonegoro	2023	874.040.000.000
		2022	804.010.000.000
		2021	955.640.000.000
5	Kabupaten Bondowoso	2023	162.170.000.000
		2022	189.500.000.000
		2021	223.140.000.000
6	Kabupaten Gresik	2023	1.172.140.000.000
		2022	1.191.800.000.000
		2021	1.031.390.000.000
7	Kabupaten Jember	2023	559.450.000.000
		2022	640.240.000.000
		2021	635.310.000.000
8	Kabupaten Jombang	2023	566.250.000.000
		2022	522.530.000.000
		2021	665.840.000.000
9	Kabupaten Kediri	2023	450.890.000.000
		2022	649.630.000.000
		2021	513.770.000.000
10	Kabupaten Lamongan	2023	528.610.000.000
		2022	507.580.000.000
		2021	604.590.000.000
11	Kabupaten Lumajang	2023	343.190.000.000
		2022	361.390.000.000
		2021	325.050.000.000
12	Kabupaten Madiun	2023	323.790.000.000
		2022	377.430.000.000
		2021	333.150.000.000
13	Kabupaten Magetan	2023	233.230.000.000
		2022	238.170.000.000
		2021	243.730.000.000

No	Kab/Kota	Tahun	Realisasi PAD
14	Kabupaten Malang	2023	940.690.000.000
		2022	763.120.000.000
		2021	669.360.000.000
15	Kabupaten Mojokerto	2023	656.120.000.000
		2022	676.710.000.000
		2021	625.420.000.000
16	Kabupaten Nganjuk	2023	247.450.000.000
		2022	445.590.000.000
		2021	478.460.000.000
17	Kabupaten Ngawi	2023	307.630.000.000
		2022	309.330.000.000
		2021	283.610.000.000
18	Kabupaten Pacitan	2023	90.730.000.000
		2022	165.240.000.000
		2021	211.690.000.000
19	Kabupaten Pamekasan	2023	267.440.000.000
		2022	231.930.000.000
		2021	203.970.000.000
20	Kabupaten Pasuruan	2023	820.240.000.000
		2022	736.240.000.000
		2021	701.200.000.000
21	Kabupaten Ponorogo	2023	231.080.000.000
		2022	321.600.000.000
		2021	376.700.000.000
22	Kabupaten Probolinggo	2023	188.410.000.000
		2022	261.450.000.000
		2021	300.400.000.000
23	Kabupaten Sampang	2023	333.380.000.000
		2022	184.050.000.000
		2021	135.500.000.000
24	Kabupaten Sidoarjo	2023	2.050.790.000.000
		2022	1.801.980.000.000
		2021	1.921.240.000.000
25	Kabupaten Situbondo	2023	266.050.000.000
		2022	253.350.000.000
		2021	228.770.000.000
26	Kabupaten Sumenep	2023	273.100.000.000
		2022	247.070.000.000
		2021	252.690.000.000

Lanjutan Tabel 1

No	Kab/Kota	Tahun	Realisasi PAD	No	Kab/Kota	Tahun	Realisasi PAD
27	Kabupaten Trenggalek	2023	267.180.000.000	33	Kota Madiun	2023	255.550.000.000
		2022	422.490.000.000			2022	264.210.000.000
		2021	233.490.000.000			2021	265.920.000.000
28	Kabupaten Tuban	2023	636.560.000.000	34	Kota Malang	2023	753.400.000.000
		2022	574.700.000.000			2022	718.340.000.000
		2021	614.730.000.000			2021	603.790.000.000
29	Kabupaten Tulungagung	2023	719.590.000.000	35	Kota Mojokerto	2023	138.700.000.000
		2022	577.540.000.000			2022	224.370.000.000
		2021	953.890.000.000			2021	256.380.000.000
30	Kota Batu	2023	209.220.000.000	36	Kota Pasuruan	2023	144.550.000.000
		2022	203.320.000.000			2022	154.690.000.000
		2021	147.010.000.000			2021	131.840.000.000
31	Kota Blitar	2023	160.460.000.000	37	Kota Probolinggo	2023	209.780.000.000
		2022	156.270.000.000			2022	191.600.000.000
		2021	297.620.000.000			2021	212.850.000.000
32	Kota Kediri	2023	351.170.000.000	38	Kota Surabaya	2023	5.771.820.000.000
		2022	319.300.000.000			2022	5.314.700.000.000
		2021	439.900.000.000			2021	4.727.280.000.000

Sumber : djpk.kemenkeu.go.id**Variabel Bebas**

Variabel bebas yang digunakan adalah Efektivitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPKDYD) (X1) dan Kontribusi HPKDYD (X2).

Efektivitas HPKDYD (X1)

Rumus yang digunakan peneliti dalam mencari data efektivitas HPKDYD sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi HPKDYD}}{\text{Anggaran HPKDYD}} \times 100\%$$

Sumber: Zuhri et al (2021)

Gambar 3 Rumus Efektivitas HPKDYD

Selanjutnya adapun kriteria dalam penentuan apakah data tersebut efektif atau tidak sebagai berikut:

Tabel 2 Kriteria Efektivitas

Presentase	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
< 75%	Tidak Efektif

Sumber: (Pekel, 2016)

Berikut tabel data yang sudah diolah peneliti efektivitas HPKDYD pada kabupaten dan kota di Jawa Timur 2021 – 2023:

Tabel 3 Efektivitas HPKDYD Kabupaten dan Kota di Jawa Timur Periode 2021 – 2023

No	Kab/Kota	Tahun	Realisasi (Miliar)		Kontribusi (%)	No	Kab/Kota	Tahun	Realisasi (Miliar)		Kontribusi (%)
			HPKDYD	PAD					HPKDYD	PAD	
1	Kabupaten Bangkalan	2023	3,10	357,76	0,87	10	Kabupaten Lamongan	2023	22,63	528,61	4,28
		2022	2,88	281,90	1,02			2022	17,20	507,58	3,39
		2021	2,76	271,66	1,02			2021	19,18	604,59	3,17
2	Kabupaten Banyuwangi	2023	22,91	567,76	4,04	11	Kabupaten Lumajang	2023	5,92	343,19	1,72
		2022	22,40	516,76	4,33			2022	6,62	361,39	1,83
		2021	21,49	520,02	4,13			2021	4,71	325,05	1,45
3	Kabupaten Blitar	2023	4,95	411,64	1,20	12	Kabupaten Madiun	2023	7,75	323,79	2,39
		2022	2,06	422,74	0,49			2022	7,99	377,43	2,12
		2021	1,94	407,53	0,48			2021	7,60	333,15	2,28
4	Kabupaten Bojonegoro	2023	182,68	874,04	20,90	13	Kabupaten Magetan	2023	4,21	233,23	1,81
		2022	137,64	804,01	17,12			2022	4,04	238,17	1,70
		2021	398,27	955,64	41,68			2021	3,72	243,73	1,53
5	Kabupaten Bondowoso	2023	4,63	162,17	2,86	14	Kabupaten Malang	2023	25,48	940,69	2,71
		2022	4,54	189,50	2,40			2022	23,51	763,12	3,08
		2021	4,26	223,14	1,91			2021	20,59	669,36	3,08
6	Kabupaten Gresik	2023	13,43	1.172,14	1,15	15	Kabupaten Mojokerto	2023	10,41	656,12	1,59
		2022	13,13	1.191,80	1,10			2022	9,04	676,71	1,34
		2021	11,33	1.031,39	1,10			2021	5,42	625,42	0,87
7	Kabupaten Jember	2023	6,44	559,45	1,15	16	Kabupaten Nganjuk	2023	4,43	247,45	1,79
		2022	6,83	640,24	1,07			2022	4,10	445,59	0,92
		2021	7,06	635,31	1,11			2021	4,04	478,46	0,84
8	Kabupaten Jombang	2023	5,78	566,25	1,02	17	Kabupaten Ngawi	2023	13,03	307,63	4,24
		2022	4,92	522,53	0,94			2022	12,23	309,33	3,95
		2021	4,56	665,84	0,68			2021	11,23	283,61	3,96
9	Kabupaten Kediri	2023	10,64	450,89	2,36	18	Kabupaten Pacitan	2023	2,96	90,73	3,26
		2022	11,15	649,63	1,72			2022	2,89	165,24	1,75
		2021	10,53	513,77	2,05			2021	2,70	211,69	1,28

Lanjutan Tabel 3

No	Kab/Kota	Tahun	Realisasi (Miliar)		Kontribusi (%)
			HPKDYYD	PAD	
19	Kabupaten Pamekasan	2023	2,28	267,44	0,85
		2022	2,23	231,93	0,96
		2021	2,08	203,97	1,02
20	Kabupaten Pasuruan	2023	4,98	820,24	0,61
		2022	4,83	736,24	0,66
		2021	4,78	701,20	0,68
21	Kabupaten Ponorogo	2023	3,51	231,08	1,52
		2022	1,23	321,60	0,38
		2021	1,15	376,70	0,31
22	Kabupaten Probolinggo	2023	6,75	188,41	3,58
		2022	6,62	261,45	2,53
		2021	6,20	300,40	2,06
23	Kabupaten Sampang	2023	6,44	333,38	1,93
		2022	5,77	184,05	3,14
		2021	5,77	135,50	4,26
24	Kabupaten Sidoarjo	2023	39,76	2.050,79	1,94
		2022	32,41	1.801,98	1,80
		2021	31,13	1.921,24	1,62
25	Kabupaten Situbondo	2023	4,96	266,05	1,86
		2022	4,86	253,35	1,92
		2021	4,79	228,77	2,09
26	Kabupaten Sumenep	2023	15,36	273,10	5,62
		2022	16,02	247,07	6,48
		2021	16,55	252,69	6,55
27	Kabupaten Trenggalek	2023	5,40	267,18	2,02
		2022	5,84	422,49	1,38
		2021	5,43	233,49	2,33
28	Kabupaten Tuban	2023	18,37	636,56	2,89
		2022	18,03	574,70	3,14
		2021	18,82	614,73	3,06
29	Kabupaten Tulungagung	2023	6,95	719,59	0,97
		2022	6,46	577,54	1,12
		2021	6,40	953,89	0,67
30	Kota Batu	2023	3,45	209,22	1,65
		2022	3,28	203,32	1,61
		2021	3,17	147,01	2,16
31	Kota Blitar	2023	1,04	160,46	0,65
		2022	0,89	156,27	0,57
		2021	0,83	297,62	0,28
32	Kota Kediri	2023	2,05	351,17	0,58
		2022	1,98	319,30	0,62
		2021	0,70	439,90	0,16
33	Kota Madiun	2023	14,98	255,55	5,86
		2022	15,60	264,21	5,90
		2021	16,20	265,92	6,09
34	Kota Malang	2023	30,27	753,40	4,02
		2022	29,51	718,34	4,11
		2021	25,97	603,79	4,30
35	Kota Mojokerto	2023	3,83	138,70	2,76
		2022	3,76	224,37	1,68
		2021	3,52	256,38	1,37
36	Kota Pasuruan	2023	6,28	144,55	4,34
		2022	6,12	154,69	3,96
		2021	5,85	131,84	4,44
37	Kota Probolinggo	2023	1,42	209,78	0,68
		2022	1,35	191,60	0,70
		2021	1,52	212,85	0,71
38	Kota Surabaya	2023	152,38	5.771,82	2,64
		2022	233,69	5.314,70	4,40
		2021	160,87	4.727,28	3,40

Sumber : djpk.kemenkeu.go.id

Tabel di atas menunjukkan hasil kontribusi HPKDYYD terhadap PAD kabupaten dan kota di Jawa Timur periode 2021 - 2023 yang mencapai persentase kontribusi tertinggi pada kabupaten Bojonegoro di tahun 2023 sebesar 41,68% mendapat kriteria baik, dan persentase kontribusi terendahnya tahun 2021 pada kota Kediri sebesar 0,16% mendapat kriteria tidak efektif.

Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		114
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-.0000771
	Std. Deviation	7,27241E+11
Most Extreme Differences	Absolute	.263
	Positive	.263
	Negative	-.226
Test Statistic		.263
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 ^c

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.

Gambar 4. Uji Normalitas

Bilangan asymp ditemukan berdasarkan hasil para peneliti tersebut di atas yang menggabungkan uji Kolmogorov-Smirnov dengan uji normalitas 0,00 adalah angka signifikansi lebih rendah dibanding dengan syarat uji normalitas yang bernilai signifikansi sebesar $< 0,05$, jadi menginformasikan tidak normal dan belum layak diberikan kesimpulan jika sampel data yang digunakan peneliti pada studi ini tidak layak untuk dipakai.

Menurut Sugiyono (2021) “pemakaian logaritma natural (Ln) pada temuan yakni bermanfaat mengecilkan fluktuasi data berlebihan dalam IBM SPSS Statistic 23”. Dengan demikian, uji Ln dapat digunakan untuk mengelola data yang tidak normal. Berikut merupakan hasil dari uji normalitas Ln:

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		114
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.74146424
Most Extreme Differences	Absolute	.082
	Positive	.082
	Negative	-.058
Test Statistic		.082
Asymp. Sig. (2-tailed)		.059 ^c

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.

Gambar 5. Uji Normalitas (Ln)

Setelah di compute variabel dengan function Ln maka mendapatkan hasil angka asymp. sig dengan jumlah 0,059 yaitu menunjukkan bahwa nominal signifikansinya melewati syarat uji normalitas yang memiliki nominal signifikansi sebesar $> 0,05$, hal tersebut menginformasikan nilai jadi normal dan dapat dihasilkan pernyataan bahwa data di sampel dapat digunakan oleh peneliti untuk temuan ini dinyatakan pantas untuk dipergunakan.

Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	4.919	1.158		4.248	.000		
	Efektivitas	.229	.253	.087	.906	.367	.976	1.025
	Kontribusi	.042	.083	.048	.500	.618	.976	1.025

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Gambar 6 Uji Multikolinearitas (Ln)

Berdasarkan di atas Uji Multikolinearitas Ln peneliti dapat memahami bahwa variabel-variabel independen di penelitian yang dilangsungkan ini ditemukan terdapat nilai Tolerance 0.976 (X1), 0.976 (X2) > 0.10 dan VIF 1.025 (X1), 1.025 (X2) < 10.00, jadi bisa dinyatakan bahwa data atas penelitian ini terbebas atau tidak memiliki tanda multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Model Summary ^a					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.135 ^a	.018	.000	6.16307E+11	1.763

a. Predictors: (Constant), Kontribusi HPKDYD, Efektivitas HPKDYD
b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Gambar 7. Uji Autokorelasi (Ln)

Melalui gambar di atas yang menggunakan compute variabel dengan function Ln didapatkan hasil nilai Durbin Watson yang memiliki nominal 1,763. temuan ini membutuhkan fase kemajuan 5% nilai DU bernilai 1,730 selanjutnya perolehan $(4 - DU = 4 - 1,730 = 2,251)$. Persyaratan tidak adanya tanda autokorelasi dengan $DU < DW < 4 - DU$ jadi pada nominal $1,730 < 1,763 < 2,251$ maka angka tersebut bisa menggambarkan kesimpulan bahwa tidak ditemukannya tanda autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	4.919	1.158		4.248	.000		
	Efektivitas	.229	.253	.087	.906	.367	.976	1.025
	Kontribusi	.042	.083	.048	.500	.618	.976	1.025

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Gambar 8 Uji Heteroskedastisitas (Ln)

Dengan output di uji heteroskedastisitas Ln tabel coefficients yang terletak pada gambar di atas yang diuji oleh peneliti menggunakan uji glesjer dapat dilihat jika angka signifikansi variabel Efektivitas HPKDYD (X1) sejumlah 0,367 dan kontribusi HPKDYD (X2) sejumlah 0,618 bahwa nilai tersebut < 0,05 dan angka signifikansi yang ditemukan

pernyataan bahwa data pada studi ini tidak memaparkan terdapatnya suatu tanda heteroskedastisitas.

Pengujian Hipotesis

Uji Parsial (t-test)

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	4,919	1,158		4,248	,000		
	Efektivitas	,229	,253	,087	,906	,367	,976	1,025
	Kontribusi	,042	,083	,048	,500	,618	,976	1,025

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Gambar 9 Uji t (Ln)

Hasil uji t efektivitas HPKDYD yang terdapat di atas mendapat nilai thitung 0,906 dengan nilai sig 0,367 > 0,050 yang berarti efektivitas berpengaruh tidak signifikan terhadap PAD Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. Hasil uji t kontribusi HPKDYD yang terdapat di atas mendapat nilai thitung 0,500 dengan nilai sig 0,618 > 0,050 yang berarti efektivitas tidak signifikan terhadap PAD Kabupaten dan Kota di Jawa Timur.

Uji Simultan (F-test)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,701	2	,350	,621	,539 ^b
	Residual	62,600	111	,564		
	Total	63,301	113			

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah
 b. Predictors: (Constant), Kontribusi, Efektivitas

Gambar 10 Uji F (Ln)

Maka hasil Uji F digambar di atas menunjukkan nilai Ftabel 0,621 dengan tingkat sig 0,539 > 0,05 yang artinya penelitian ini tidak signifikan pada variabel independen Efektivitas HPKDYD (X1) dan Kontribusi HPKDYD (X2) terhadap variabel dependen PAD kabupaten dan kota di Jawa Timur.

Uji Koefisien Determinasi (Uji R2)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,135 ^a	,018	,000	6,16307E+11	1,763

a. Predictors: (Constant), Kontribusi HPKDYD, Efektivitas HPKDYD
 b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Gambar 11 Uji Koefisien Determinasi (Ln)

Kisaran nilai koefisien determinasi adalah 0 sampai 1. Jika nilai adjusted R yang disesuaikan mendekati 1, maka variabel terikat dapat menjelaskan hampir seluruh informasi yang diperlukan untuk memperkirakannya. Maka sesuai data di atas bahwa nilai yang di dapat pada temuan di atas bernilai 0,135 menginformasikan tidak mendekati 1 mampu disimpulkan variabel-variabel dependen PAD tidak bisa menjelaskan hampir secara keseluruhan informasi.

PEMBAHASAN

Peranan Efektivitas HPKDYD terhadap PAD

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, bahwa efektivitas HPKDYD tidak signifikan terhadap PAD pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. Selanjutnya dari hasil perhitungan efektivitas HPKDYD dalam uji t nilai $\text{sig} > 0,05$, mendapat angka 0,367 yang berarti efektivitas HPKDYD tidak signifikan terhadap PAD. Ketidak signifikan ini bisa disebabkan banyaknya komponen pada PAD, ada kemungkinan walaupun hasil efektivitas tinggi tetapi masih kalah dengan komponen PAD lainnya. Temuan ini berbeda dengan temuan yang lalu tentang HPKDYD berpengaruh sangat efektif dalam mengelolanya dengan rata-rata presentase sebesar 100,08. (Zukhri et al., 2021).

Peranan Kontribusi HPKDYD terhadap PAD

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, bahwa HPKDYD berpengaruh kurang signifikan terhadap PAD Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. Selanjutnya dari hasil perhitungan kontribusi HPKDYD dalam uji t nilai $\text{sig} > 0,05$, mendapat angka 0,618 berarti HPKDYD memberikan kontribusi yang tidak signifikan terhadap PAD. Temuan ini berbeda dengan temuan yang lalu mendapatkan hasil penelitian bahwa kontribusi HPKDYD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Belitung Timur dalam mengelolanya dengan angka signifikan α 0,00 kurang dari 0,05. (Zukhri et al., 2021)

Peranan Efektivitas dan Kontribusi HPKDYD terhadap PAD

Berdasarkan hasil olahan data ketiga variabel-variabel independen dari Efektivitas HPKDYD (X1) dan Kontribusi HPKDYD (X2) secara simultan berpengaruh kurang signifikan terhadap PAD (Y) Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. Yang diberikan dari variabel X1 dan X2 ini belum bisa berperan signifikan lebih besar dalam Y, dalam situasi ini pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan pendapatan. HPKDYD ini maka akan memberikan peran lebih besar dalam PAD.

KESIMPULAN

Peneliti menemukan temuan-temuan yang peneliti peroleh dari penyelidikan berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan berjudul Efektivitas dan Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan (HPKDYD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten dan Kota Tahun 2021 – 2023 seperti: Secara parsial dan empiris

efektivitas HPKDYD tidak berpengaruh terhadap PAD Kabupaten dan Kota di Jawa Timur pada tahun 2021-2023. Lalu secara parsial dan empiris kontribusi HPKDYD tidak berpengaruh terhadap PAD Kabupaten dan Kota di Jawa Timur pada tahun 2021-2023. Lalu secara simultan dan empiris efektivitas HPKDYD dan kontribusi HPKDYD tidak berpengaruh terhadap PAD Kabupaten dan Kota di Jawa Timur pada tahun 2021-2023.

SARAN

Adapun dalam melaksanakan penelitian, peneliti berharap dapat memperoleh berbagai informasi dan saran perbaikan yang lebih sempurna, peneliti akan menerima masukan dan saran dengan senang hati. Peneliti selanjutnya dalam akademik ini berarti kaitannya menghitung efektivitas dan kontribusi HPKDYD, pajak daerah, retribusi daerah dll atau menambah variabel lain. Untuk pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Timur supaya dapat menaikkan efektivitas dan kontribusi HPKDYD, peneliti berharap supaya tiap-tiap pemerintah daerah kabupaten dan kota di Jawa Timur memperhatikan kebijakan yang memberikan insentif kepada investor yang mempunyai kemampuan mendirikan badan usaha daerah di kabupaten dan kota di Jawa Timur, serta berkonsentrasi pada pengelolaan pajak daerah dalam upaya meningkatkan PAD. Untuk meningkatkan kontribusi BUMD, pemerintah daerah juga dapat melakukan inisiatif intensifikasi dan ekstensifikasi pada BUMN dan Pengusaha Swasta sebagai sumber HPKDYD.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiyah, J., & Masyitah, E. (2023). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab. Deli Serdang. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 06(01), 9680–9691. <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/jaksi/article/view/1613%0Ahttps://ejournal.unma.ac.id/index.php/jaksi/article/download/1613/1029>
- Dipdagri, K. N. 690. 900. 32. (1997). Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.
- Firdausy, C. M. (2017). Kebijakan dan strategi peningkatan pendapatan asli daerah dalam pembangunan nasional. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Funangi, U., Mollet, J. A., & Bisay, C. M. (2018). ANALISIS EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI PAPUA. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah* |, 43–62.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25 edisi ke-9. Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2016). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat.
- Indonesia, P. (2022). UU Nomor 1 Tahun 2022. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757, 104172, 1–143. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=22499>
- Koagouw, B., Karamoy, H., & Lambey, R. (2018). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Terhadap Pajak Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 372–380. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21160.2018>

- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Terbaru 2018 (XIX). Andi.
- Mayssara A. (2018). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain-Lain Pad Yang Sah Pada Pendapat Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents, 1(1), 126–136.
- Natsir, A. A., Sylvia, & Kitta, S. (2023). PENGARUH PAJAK DAERAH, INFLASI DAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN MAROS Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar 2 Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel. 1(5), 492–506. <https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/gbj%7C492>
- Pekei, B. (2016). Konsep dan analisis efektivitas pengelolaan keuangan daerah di era otonom (Cet. 1).
- Rafi, M., Anwar, H. S., & Malik, I. (2022). Efektivitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2017-2019 Di Kota Bandung. Jurnal Inovasi Penelitian, 2(12), 4129–4138.
- Rizalni, R. A. (2023). Berpengaruhkah Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah? Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa, 1(4), 295–316.
- Saputra, H. (2022). PENGARUH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU. In Fakultas Administrasi Publik Universitas Islam Riau.
- Siahaan, M. P. (2013). Pajak daerah & retribusi daerah. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (In Kedua C). M. Dr. Ir.Sutopo, S.Pd (ed.); ke2 ed.
- Susanti, A. A., Nurdiwaty, D., & Kurniawan, A. (2023). Pengaruh Pbb, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Pad Kota Kediri Tahun 2018-2022. Jurnal Seminar Manajemen Ekonomi Akuntansi, 32, 681–689.
- Yunita, N., & Fahrani, D. (2020). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Bphtb Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo. Greenomika, 2(2), 130–141. <https://doi.org/10.55732/unu.gnk.2020.02.2.6>
- Zukhri, N., Aqdas, A., & Yanuar, D. (2021). Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belitung Timur. Equity: Jurnal Ekonomi, 9(1), 1–10. <https://doi.org/10.33019/equity.v9i1.63>